

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Gunawan, Darmawan dan Purnamawati, 2015) [1]. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi para manajer untuk menunjukkan efektivitas pencapaian tujuan dan untuk melaksanakan fungsi pertanggungjawaban dalam organisasi (Elfira, 2014) [2]. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ketatnya persaingan dalam dunia usaha atau bisnis menjadi pemicu yang kuat bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik bagi perusahaan yang dipimpinnya, karena baik buruknya performa perusahaan akan berdampak terhadap nilai pasar perusahaan di pasar dan juga mempengaruhi minat investor untuk menanam atau menarik investasinya dari sebuah perusahaan (Indra Cahya, 2017) [3].

Teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “*nexus of contract*” (Pagalung, 2008)[4]. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi karena agen memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Dalam kondisi asimetri tersebut, agen dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Secara umum manajemen laba (*earnings management*) didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi - informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Gustinya, 2016). [5] Sedangkan menurut Gunawan dkk (2015) Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laba .

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang tidak sebenarnya mengenai keadaan keuangan perusahaan dengan cara memanipulasi laba yang yang dihasilkan, nantinya akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang akan dibuat oleh para pengguna laporan seperti pemegang saham dan akan berpengaruh terhadap hasil kontrak yang didasarkan pada jumlah yang tertera dalam laporan keuangan (Yatulhusna, 2015) [6].

Manajemen laba dilakukan oleh seorang manajer atau penyusun laporan keuangan karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Manajemen laba dapat memberikan gambaran tentang perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usaha pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk merekayasa data keuangan. Salah satu motivasinya adalah untuk memenuhi harapan pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditor. Pihak eksternal ini memiliki kepentingan atas kinerja keuangan perusahaan, dimana mereka menginginkan agar perusahaan dapat terus beroperasi dengan hasil yang baik. (Karnawati, 2018). [7]

Ada berbagai cara dalam manajemen laba, diantaranya pemilihan metode akuntansi atau kebijakan akrual, tetapi cara yang paling sering dilakukan adalah dengan kebijakan akrual. Laba merupakan komponen yang sangat penting bagi partisipan pasar modal. Manajemen laba dari kebijakan akrual tersebut dapat berhubungan dengan harga saham, laba yang akan datang dan aliran kas, dan dapat disimpulkan bahwa manajer memilih akrual untuk meningkatkan keinformatifan dari laba akuntansi. Bagi manajer, laba akuntansi juga dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi privat mereka dan untuk menunjukkan kemampuan laba untuk mencerminkan nilai ekonomis.

Manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual* yaitu dapat bernilai nol, positif atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*), nilai positif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memperbolehkan manajemen untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Hal tersebut berkaitan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur

yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan adanya kebebasan itulah, maka menurut Scott (2009)[8] manajer mempunyai kecenderungan melakukan suatu tindakan yang menurut teori akuntansi positif dinamakan sebagai tindakan oportunistik (*opportunistic behavior*).

Fenomena adanya praktik manajemen laba pernah terjadi pada Perusahaan Elektronik Raksasa asal Jepang, Toshiba. Pada bulan Mei 2015, Toshiba perusahaan yang berdiri sejak tahun 1875 itu mengejutkan seluruh dunia saat menyatakan bahwa perusahaannya tengah melakukan investigasi atas skandal akuntansi internal dan harus merevisi perhitungan laba dalam 3 tahun terakhir. Pengumuman tersebut sangat tidak disangka karena Toshiba telah menjadi lambang perusahaan Jepang yang sangat kuat. Setelah diinvestigasi secara menyeluruh, diketahuilah bahwa Toshiba telah kesulitan mencapai target keuntungan bisnis sejak tahun 2008 di mana pada saat tengah terjadi krisis global. Krisis tersebut juga melanda usaha Toshiba hingga akhirnya Toshiba melakukan suatu kebohongan melalui *accounting fraud* dengan menggelembungkan laba senilai 1.22 milyar dolar Amerika. Tindakan ini dilakukan dengan berbagai upaya sehingga menghasilkan laba yang tidak sesuai dengan realita.

Pada tanggal 21 Juli 2015, CEO Hisao Tanaka mengumumkan pengunduran dirinya terkait skandal akunting yang ia sebut sebagai peristiwa yang paling merusak merek Toshiba sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Toshiba. Delapan pimpinan lain juga ikut mengundurkan diri, termasuk dua CEO sebelumnya. Nama Toshiba kemudian dikeluarkan dari indeks saham dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Pada akhir tahun 2015, Toshiba telah merugi sebesar 8 milyar dolar Amerika.

Terbongkarnya kasus ini diawali saat audit pihak ketiga melakukan investigasi internal terhadap keuangan perusahaan. Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa manajemen perusahaan menetapkan target laba yang tidak realistis sehingga saat target tersebut tidak tercapai, pemimpin divisi terpaksa harus berbohong dengan memanipulasi data laporan keuangan (Sari, 2017) [9]

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus – kasus manajemen laba yang menimpa perusahaan besar. Pada penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi tahun 2013 – 2017. Perusahaan farmasi merupakan perusahaan yang penting bagi masyarakat dan akan terus bergerak ke depan seiring perkembangan penelitian produknya (obat – obatan) dalam memenuhi misi menyetatkan masyarakat Indonesia. Hal ini tentu akan turut mendorong investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan farmasi ini. Alasan lainnya adalah

dikarenakan terdapat kasus – kasus manajemen laba yang menimpa perusahaan tersebut diantaranya :

Tabel 1.1
Kasus manajemen laba pada perusahaan farmasi

Perusahaan	Kasus
PT. Kimia Farma Tbk.	PT. Kimia Farma menyajikan laporan keuangan yang <i>overstate</i> sebesar Rp. 32,7 miliar untuk tahun 2001. Direktur produksi mengotorisasi dua buah daftar harga persediaan yang salah satunya digelembungkan nilainya. Dengan begitu beban pokok penjualan menjadi lebih rendah sehingga labanya naik.
PT. Indofarma Tbk.	Kasus ini merupakan kasus kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan. Nilai barang dalam proses yang disajikan dalam laporan keuangan PT. Indofarma pada 2010 lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dilaporkan. Akibatnya harga pokok produksi menjadi lebih rendah dan laba menjadi lebih tinggi dari seharusnya,

Sumber : Rachmawati (2015) [10]

Dan berikut ini disajikan tabel rata – rata manajemen laba (*discretionary accrual*) pada perusahaan farmasi di BEI tahun 2013 - 2017 :

Tabel 1.2
Rata – Rata *Discretionary Accrual* Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata	0.32	(0.51)	0.24	(0.31)	(0.20)

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tren rata – rata *discretionary accrual* pada perusahaan farmasi berfluktuatif, ada yang diatas angka nol dan dibawah

angka nol. Diatas angka nol artinya manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan cara menaikkan laba, sedangkan dibawah angka nol dengan cara menurunkan laba. Nilai rata – rata tertinggi praktik manajemen laba dengan menaikkan laba adalah di tahun 2013 sebesar 0,32 sedangkan tertinggi dengan cara menurunkan laba adalah di tahun 2014 yaitu sebesar -0,51.

Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses manipulasi laporan keuangan karena terdapatnya beberapa pilihan metoda yang dapat digunakan dan bukan sebagai suatu larangan. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor suatu perusahaan masalah kontrak dan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*) (Kusumawardhani, 2012) [11]

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Good Corporate Governance merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholders*, termasuk di dalamnya adalah *shareholders, lenders, employees, executives, government, customers* dan *stakeholders* yang lain (Hastuti, 2012 dalam Sulistyowati, 2017) [12]. Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat (Nasution dan Setiawan, 2007) [13].

Ujiyantho dan Pramuka (2007) [14] mengungkapkan *Corporate governanace* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat memaksimalkan nilai perseroan bagi perseroan tersebut dan bagi pemegang saham (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2013). [15]

Di Indonesia, permasalahan tata kelola (*corporate governance*) menimbulkan beberapa skandal dalam dunia bisnis diantaranya yaitu : Bank Mega bersama dengan PT. Elnusa tahun 2010, melakukan pembobolan dana nasabah deposito sebesar Rp 111 Milyar yang dilakukan oleh 6 tersangka yang juga karyawan perusahaan Bank Mega dan PT. Elnusa. Ditahun 2011 pada Citibank, Kasus pembobolan dana Rp 17 Milyar oleh senior Manager Citibank dengan cara mentransfer uang tersebut ke sebuah

perusahaan dirinya serta dibantu oleh teller. Sinar Mas Group pada tahun 2014, berdasarkan laporan masyarakat serta hasil audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dilaporkan tahun lalu, WALHI menyinyalir terdapat penyelewengan pajak dana reboisasi dari lahan seluas 2.000 hektar yang dikelola oleh Sinar Mas Group, Lahan itu diduga kuat dikelola tanpa mengantongi izin konsesi. Dari kasus ini Sinar Mas Group melalui tiga anak perusahaannya merugikan kas Negara sebesar Rp 181,7 Milyar.

Terlihat sekali disini bahwa perusahaan-perusahaan raksasa pun dapat tumbang yang salah satu faktornya adalah lemahnya penerapan prinsip-prinsip GCG dan terkait persoalan moral dan etika yang kurang baik, lemahnya dalam tata cara kelola perusahaan yang tidak efisien, efektif, ekonomis, dan produktif tanpa mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders serta penegakkan hukum yang lemah. Hal ini juga dikarenakan semakin terpisahnya hubungan antara principal dengan agent yang kurangnya transparan perusahaan dalam pelaporan kinerja perusahaan [16].

Mekanisme *corporate governance* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manajemen laba dan dapat berjalan dengan baik apabila menerapkan asas-asas yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Indikator dari mekanisme *corporate governance* antara lain meliputi Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank (Moradi, 2012) [17]. Kepemilikan institusional dapat mewakili prinsip *corporate governance* : *transparency* (keterbukaan). Keterbukaan yang dimaksud adalah terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dengan tetap memperhatikan kepentingan – kepentingan pemegang saham lainnya tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham investor. Kepemilikan institusional dapat berperan dalam memonitor agen (manajer) perusahaan. Selain itu, investor institusional memiliki akses informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011) [18]. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005) [19].

Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat control eksternal terhadap perusahaan. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Berikut ini disajikan tabel rata – rata kepemilikan institusional pada perusahaan farmasi di BEI tahun 2013 - 2017 :

Tabel 1.3
Rata – Rata Kepemilikan Institusional Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata (%)	81.09	80.98	81.23	81.19	81.39

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan rata – rata kepemilikan saham institusional perusahaan farmasi yang berfluktuatif dari tahun ke tahunnya, tetapi cenderung di angka 80% ke atas. Kepemilikan saham tertinggi berada di tahun 2017 sebesar 81,39% dan terendah di tahun 2014 sebesar 80,98%.

Penelitian yang dilakukan Cahyani Dewi Anggraeni (2017) [20] menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham, manajemen perusahaan akan diawasi oleh investor – investor institusional sehingga kinerja manajemen juga akan meningkat dan dapat mengurangi *agency cost* . Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi sebagian manajemen laba.

Komisaris Independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi oleh pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam hubungann bisnis maupun hubungan kekeluargaan (FCGI, 2001 dalam Wijayanti, 2009)[21]. Tujuan menghadirkan menghadirkan seorang komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dalam susunan keanggotaan dewan komisaris serta menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi pengawasannya (Amirudin, 2004 dalam Wijayanti, 2009). Dengan demikian komisaris ini dapat mewakili prinsip *corporate governance : fairness* (kesetaraan dan kewajaran). Diharapkan dengan adanya komisaris independen dapat membantu pemegang saham dalam mengawasi kinerja manajemen untuk mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan melalui praktik manajemen laba.

Terkait dengan jumlah/ proporsi Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang *listed* di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan tersebut, persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (Okezone.com, 2012) [22]. Berikut ini disajikan tabel presentase anggota komisaris independen :

Tabel 1.4
Rata – Rata Komisaris Independen Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata (%)	38.99	38.78	41.61	40.71	41.96

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa rata – rata proporsi komisaris independen perusahaan farmasi yang mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi masih di atas angka minimal 30% dari peraturan BEI terkait jumlah komisaris independen yang harus dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Proporsi komisaris independen tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 41,96 %.

Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) [23] menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin tinggi pengawasan pada perusahaan sehingga dapat meminimalkan kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Wulan Pramesty (2017) [24] menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Dewan Komisaris merupakan salah satu indikator *good corporate governance* yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manajemen laba dengan mewakili prinsip *corporate governance* : *responsibility* (pertanggung jawaban). Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance* (Hamdani,2016) [25].

Wardhani (2011) [26] mengatakan mengatakan bahwa peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan bahwa Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Semakin banyak jumlah dewan komisaris semakin berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan kinerja manajemen untuk meminimalisir kecurangan dalam laporan keuangan seperti manajemen laba. Meskipun begitu jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Hamdani, 2016). Berikut ini disajikan tabel rata – rata jumlah anggota Dewan Komisaris pada perusahaan farmasi di BEI tahun 2013 – 2017 :

Tabel 1.5
Rata – Rata Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata	4.50	4.25	4.25	4.75	4.63

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.5 diatas menunjukkan bahwa rata – rata ukuran dewan komisaris perusahaan farmasi sebanyak 4 orang. Banyaknya anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan Setyarso Herlambang (2015) [27] menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Salah satu komite tambahan untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam menjalankan tugas adalah komite audit. Komite audit dapat mewakili prinsip *corporate governance* yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *independency* (independen).

Komite audit dibentuk untuk membantu tugas pengawasan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit dalam perusahaan diharapkan dapat memperkecil praktik manajemen laba. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemangku saham dan pemangku kepentingan lain, maka disini perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dari komite audit ini. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh (independen) direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya dan Yustivandana, 2008) [28]

Berikut ini disajikan data anggota komite audit pada perusahaan farmasi di BEI tahun 2013 - 2017:

Tabel 1.6
Rata – Rata Anggota Komite Audit Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata	3.13	2.88	3.13	3.13	3.25

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.6 diatas menunjukkan bahwa rata - rata anggota komite audit perusahaan farmasi selama 4 tahun sebanyak 3 orang. Hanya di tahun 2014 saja rata – ratanya menurun, yaitu 2 orang. Hal ini menggambarkan bahwa rata – rata anggota komite audit perusahaan farmasi yang sudah terdaftar di BEI telah memenuhi regulasi pemerintah dimana berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit.

Penelitian Riza Noor Rachamawati (2015) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba. Namun hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian Cahyani Dewi Anggraeni (2017), komite tidak berpengaruh terhadap manajemen laba .

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer,

dan karyawan (Boediono, 2005). Kepemilikan saham ini juga merupakan perwujudan dari prinsip *corporate governance* : *transparency* (keterbukaan) Ada tidaknya kepemilikan saham oleh manajemen akan mempengaruhi motivasi manajemen dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dengan porsi kepemilikan saham oleh manajemen di perusahaan, maka diharapkan manajemen akan lebih bertindak bijak dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Khususnya keputusan dalam memberi informasi yang sebenarnya (transparan) mengenai kondisi perusahaan kepada *principal*, tidak hanya mementingkan kepentingan sebagai agen, karena dalam hal ini mereka juga merupakan pihak pemegang saham. Oleh karena itu, presentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi manajemen laba. Berikut ini disajikan data presentase rata - rata kepemilikan manajerial pada perusahaan farmasi di BEI tahun 2013 – 2017:

Tabel 1.7
Rata – Rata Kepemilikan Manajerial Perusahaan Farmasi

Perusahaan Farmasi	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata (%)	2.92	2.92	2.91	2.91	2.91

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.7 menunjukkan bahwa rata – rata kepemilikan manajerial perusahaan farmasi selama 5 tahun cenderung sama. Di tahun 2013 dan 2014 diangka 2,92%, sedangkan tahun 2015 – 2017 di angka 2,91%. Angka tersebut tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan rata – rata kepemilikan institusional. Hal ini dapat dikhawatirkan akan terjadi ketidakselarasan kepentingan antara *agent* dan *principal*.

Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengindikasikan menurunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (Purwaningtyas, 2011) [29]. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusumawardhani yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Okta Nofiasari (2016)[30] menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Atas dasar uraian tersebut diatas terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda (*Research gap*) atau ketidak konsistenan hasil penelitian terhadap variabel yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu penulis termotivasi untuk menguji kembali

faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen laba dengan mengambil judul penelitian “**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013 – 2017)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya industri besar seperti perusahaan farmasi yang melakukan praktik manajemen laba dengan cara menurunkan laba.
2. Terdapat mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan farmasi yang sudah memenuhi syarat dari peraturan BEI sebagai pengelolaan perusahaan tetapi tidak diterapkan dengan baik sehingga terjadi praktik manajemen laba.
3. Terdapat mekanisme *corporate governance* dalam industri farmasi yang kurang sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan motivasi – motivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi yang telah diuraikan diatas, terjadi beberapa masalah yang muncul dari penerapan *Good Corporate Governance*. Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini agar tujuan dari pembahasan ini dapat dimengerti dengan baik , tepat dan fokus. Dimana pembatasan masalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variable Mekanisme *Good Corporate Governance* sebagai variable independen (x) dan aktifitas manajemen laba sebagai variable dependen (y).
2. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial.
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebuah perumusan masalah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba secara simultan ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba secara Parsial?
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial ?
5. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial?
6. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian Rumusan Masalah diatas, penulis dapat memberikan beberapa alasan dan maksud tujuan dari penelitian yang ingin disampaikan diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba secara simultan.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba secara parsial.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen laba secara parsial.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap manajemen laba secara parsial.
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komite Audit terhadap manajemen laba secara parsial.
6. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba parsial.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis dapat berharap memberikan sebuah penelitian yang bermanfaat untuk berbagai pihak yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan go public, terutama yang berkaitan dengan struktur kepemilikan saham dan penerapan *corporate governance* dalam kaitannya untuk pengambilan keputusan.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang, terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen laba.